

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek telah didefinisikan dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka. Istilah Efek juga dijelaskan di dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal yaitu surat berharga, merupakan surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek. Setiap negara pastinya memiliki bursa efeknya masing-masing. Di Indonesia sendiri juga memiliki Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dikenal dengan sebutan IDX (*Indonesia Stock Exchange*). Maka dari itu Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat diartikan sebagai sebuah lembaga pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara bursa. Tidak hanya itu BEI juga mempunyai peran sebagai fasilitator Perdagangan Efek, seperti halnya menyediakan semua sarana perdagangan efek (fasilitator), membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, melakukan pencatatan terhadap semua instrumen efek, dan menyebarluaskan informasi bursa (transparansi) serta sebagai Otoritas yang mengontrol setiap jalannya transaksi, seperti melakukan pemantauan kegiatan transaksi efek, mencegah adanya praktik manipulasi harga yang tidak wajar yang dilarang oleh Undang-undang, melakukan pembekuan perdagangan/*suspend* untuk emiten saham yang melanggar ketentuan bursa efek dan juga melakukan pencabutan atas efe/*delisting* sesuai aturan yang berlaku. Setiap perusahaan yang ingin *go public* di Indonesia harus melalui BEI karena BEI merupakan bursa yang resmi di Indonesia. Bursa Efek Indonesia memiliki tiga kategori yaitu sektor utama yang merupakan industri penghasil bahan baku atau industri pengelola sumber daya alam, sektor industri manufaktur, dan sektor industri jasa (Finansialku, 2018).

Sektor jasa merupakan unit usaha yang mempunyai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen tanpa adanya suatu kegiatan memproduksi produk berupa barang yang dapat digunakan. Tetapi sektor jasa memiliki tujuan yang sama dengan sektor lainnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Dilihat berdasarkan teori, fungsi sektor jasa yaitu sebagai penghubung antara berbagai sektor dan konsumen maupun modal. Di dalam Bursa Efek Indonesia, sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi menjadi salah satu sektor yang terdaftar dan termasuk dalam kelompok *Tertiary Sector* (Sektor ketiga) dengan aktivitas utamanya yaitu jasa. Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi dibedakan menjadi lima subsektor yang bergerak sesuai dengan bidangnya yaitu:

1. Subsektor Energi
2. Subsektor Jalan Tol, Bandara, Pelabuhan
3. Subsektor Telekomunikasi
4. Subsektor Transportasi
5. Subsektor Konstruksi Non Bangunan



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Sektor Jasa

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan Perekonomian (www.bi.go.id)

Berdasarkan grafik diatas, sektor jasa setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian indonesia. Seperti pada tahun 2013 pertumbuhan sektor jasa berkontribusi sebesar 7,9% tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 5,9% . Lalu pada tahun 2015 sektor jasa berusaha untuk meningkatkan kembali pencapaian kontribusinya sehingga mengalami peningkatan menjadi 7,69%. Tetapi sektor jasa kembali mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 7,36% pada tahun 2016. Setelah mengalami kenaikan maupun penurunan di beberapa tahun sebelumnya, akhirnya sektor jasa mengalami peningkatan yang dirasakan cukup besar pada tahun 2017 yaitu sebesar 8,44%. Hal tersebut membuktikan bahwa sektor jasa dapat mengatasi setiap penurunan yang dialaminya.

Pada tahun 2017, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Kementerian Keuangan Adriyanto mengatakan sektor jasa memiliki kontribusi terbesar terhadap PDB. Sektor jasa akan mendominasi ekonomi Indonesia ke depannya, sedangkan kontribusi sektor manufaktur terlihat terus mengalami tren penurunan. Sektor jasa mengalami pertumbuhan tinggi selama beberapa tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan sektor jasa selama delapan tahun terakhir mencapai 7,05% per tahun. Sebagaimana sektor ekonomi lainnya, sektor jasa juga pernah mengalami perlambatan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional. Sebagai primadona baru pertumbuhan, kontribusi sektor jasa sangat besar. Saat ini kontribusi sektor jasa mencapai 54% dari produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan 47% tenaga kerja bekerja pada sektor ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Indonesia Services Dialogue (2018) kajian yang dilakukan oleh Indonesia Services Dialogue (2018) menunjukkan bahwa sektor jasa memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang relatif besar. Nilai indeks keterkaitan ke belakang sektor jasa berkisar 1,42 hingga 2,06, di mana sub-sektor jasa yang memiliki angka tertinggi adalah transportasi kereta api, restoran dan hotel serta konstruksi. Sementara itu keterkaitan ke depan berkisar antara 1,09 dan 2,22, dimana

sub-sektor jasa yang memiliki nilai tertinggi adalah lembaga perantara keuangan, listrik-gas-air dan jasa terkait transportasi. Maka semakin besarnya kontribusi sektor jasa saat ini merupakan suatu wujud dari transformasi ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Perekonomian nasional yang awalnya ditopang oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan) beralih ke sektor sekunder (industri manufaktur), lalu mulai beralih ke sektor tersier (jasa). Sehingga sektor jasa dinilai sektor paling penting dalam perekonomian Indonesia karena sektor jasa dapat menciptakan lapangan kerja dan akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia (Finansial Bisnis, 2018).

Menurut Direktur Strategi dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Scheider Siahaan menyatakan bahwa Sektor jasa saat ini sudah mulai mendominasi kondisi perekonomian nasional sebesar 60%, hal tersebut menjadi salah satu langkah yang baik karena beberapa negara-negara maju saat ini pun juga didominasi oleh sektor jasa. Hal yang perlu diingatkan bahwa dalam sektor jasa, salah satu hal penting yang perlu dibenahi yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Indonesia sudah memiliki peringkat yang bagus seperti kenaikan dalam "*investment grade*". Sebagaimana yang telah diketahui, negara-negara anggota ASEAN berupaya untuk memperkuat kerja sama dengan negara mitra untuk sektor perdagangan di bidang barang, jasa, investasi dan peningkatan kapasitas, khususnya pada saat memasuki integrasi ekonomi pada 2016-2025 (Economy Okezone, 2018).

Tabel 1. 1 Total Perusahaan dari Subsektor Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2017

No	Subsektor	Jumlah Perusahaan
1	Subsektor Energi	7
2	Subsektor Jalan Tol, Bandara, Pelabuhan	3
3	Subsektor Telekomunikasi	5
4	Subsektor Transportasi	35
5	Subsektor Kontruksi Non Bangunan	10
Total Perusahaan		60

Sumber: (www.sahamok.com)

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan pembangunan infrastruktur besar-besaran mulai dari pembangunan waduk hingga jalan tol. Head of Equities and Research, UBS Indonesia Joshua Tanja menjelaskan, keseriusan pemerintah di sektor infrastruktur yang terlihat sangat jelas membuat investor tampak menggilai sektor tersebut. Dengan kepastian pemerintah di sektor infrastruktur, Joshua menjelaskan sejumlah saham juga akan diuntungkan. Selain saham-saham perusahaan kontraktor, secara tidak langsung saham properti dan semen juga berpotensi mendulang untung. Maka pembangunan infrastruktur, utilitas, dan transportasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional karena sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi mempunyai peranan begitu penting dalam membantu pergerakan roda ekonomi Indonesia (Liputan6, 2018).

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menggunakan perusahaan jasa sebagai objek penelitian terutama pada sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Alasannya karena sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dinilai sektor paling penting dalam perekonomian Indonesia. Selain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sektor jasa dapat menjadi salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam pemerataan pembangunan sehingga dapat membantu pergerakan roda ekonomi Indonesia.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Semakin ketatnya persaingan di dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik auditor harus berusaha menjaga kualitas auditor dengan menjalankan kegiatan audit sesuai dengan standar yang berlaku. Standar audit berbeda dengan prosedur audit. “Prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “Standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut (PSA No.1, Standar Audit Seksi 150). DeAngelo (1981) dalam (Tandiotong, 2016) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas penilaian-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) kegiatan audit yang dilaksanakan oleh auditor tersebut dapat dikatakan berkualitas jika telah memenuhi ketentuan atau standar auditing yang telah ditetapkan. Audit laporan keuangan menjadi salah satu kebutuhan perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. Maka laporan keuangan yang telah diaudit diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan posisi keuangan, hasil operasi dan arus uang dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu seorang auditor akan memberikan laporan akuntan sebagai perwujudan pendapatnya dari hasil pemeriksaan keuangan yang telah dilakukannya. Selama memeriksa laporan keuangan untuk menjaga kualitas audit, auditor harus dapat menjaga independensi. Kualitas audit tidak akan lepas dari standar umum audit, karena setiap auditor harus memiliki keahlian, bersikap cermat dan bersikap independen, dan seksama dalam pelaksanaan tugasnya (Paramita dan Latrini, 2015 dalam (Rizky, 2017). Untuk meningkatkan kualitas audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, auditor harus memiliki informasi yang berkualitas dan relevan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan dari klien terhadap auditor.

Pada tahun 2017 Kantor Akuntan Publik Mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia yakni KAP Purwantono, Suherman, & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 Juta (Sekitar 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat di vonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB). Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara berkembang sesuai kode etik. Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular, namun PCAOB menyatakan afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. Ternyata tak lama sebelum pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang "tidak benar" sehingga menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan, dan pada akhirnya PCAOB mengenakan denda US\$ 1 juta dan memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan dimanakah sikap profesional seorang auditor yang menggambarkan kualitas audit dalam mengaudit laporan keuangan sehingga muncul masalah bahwa kantor akuntan public Mitra Ernst & Young's (EY) telah gagal dalam melakukan audit laporan keuangan (Tempo, 2017).

Lalu kasus selanjutnya terjadi pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS). PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) mendapat sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi tersebut diberikan karena banyak ditemukan kesalahan di laporan keuangan perusahaan kuartal III-2014. Dengan mendapatkan pernyataan opini audit tidak wajar karena adanya kesalahan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan. PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) sebelumnya memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan pada audit laporan keuangan tahun 2013. lalu selanjutnya Inovisi menunjuk kantor akuntan publik (KAP)

yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan Inovisi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan Rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Dwi Riandhini selaku sekretaris perusahaan Inovisi menyatakan bahwa dilakukannya pergantian KAP agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan tersebut dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Perdagangan saham Inovisi dihentikan sejak Jumat 13 Februari 2015. BEI menemukan ada delapan kesalahan dalam laporan keuangan Sembilan bulan 2014 (Detik Finance, 2015).

Kemudian kasus lainnya terjadi di PT Jasa Marga Persero, yaitu KPK memanggil Head of Internal Audit PT Jasa Marga Persero, Laviana Sri Hardini. Dia akan dimintai keterangan untuk mendalami kasus suap motor gede Harley-Davidson, yang diberikan GM PT Jasa Marga Persero cabang Purbaleunyi Setia Budi kepada auditor BPK Sigit Yugoharto. Dalam kasus ini, KPK menetapkan auditor BPK Sigit Yugoharto dan GM PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi Setia Budi sebagai tersangka kasus suap moge Harley-Davidson kepada auditor BPK. Penetapan ini merupakan pengembangan dari penyelidikan. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan dengan tujuan terhadap Kantor Cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi pada 2017. Dan audit tersebut dilakukan terhadap penggunaan anggaran dana pada 2015-2016. Sigit, selaku Auditor Madya BPK diduga menerima hadiah atau janji yang sangat bertentangan dengan kewajibannya terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga pada 2017. Karena Sigit Yugoharto telah mengubah hasil temuan sementara tim pemeriksa BPK atas PDTT terhadap pengelolaan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga Persero maka Setia Budi memberi suap Motor Gede (moge) tersebut. Atas perbuatan itu Setia Budi diancam pidana berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 64 ayat 1 KUHP (Detik.com, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Vice President Internal Audit PT Garuda Indonesia Sri Mulyati. Sri Mulyati diperiksa untuk tersangka mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar. Selain itu, KPK juga memanggil pegawai Garuda Indonesia, Ike Andriani. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi Emirsyah. KPK telah menetapkan Emirsyah Satar sebagai tersangka sejak Januari 2017. Emirsyah diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset yang nilainya diduga lebih dari 4 juta dollar AS atau setara dengan Rp 52 miliar dari perusahaan asal Inggris Rolls-Royce. Selain Emir, KPK juga menetapkan Soetikno Soedarjo sebagai tersangka. Soetikno yang merupakan *beneficial owner* Connaught International Pte Ltd diduga bertindak sebagai perantara suap. KPK menduga suap tersebut terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia pada periode 2005-2014. Uang dan aset yang diberikan kepada Emir diduga diberikan Rolls-Royce agar perusahaan asal Inggris tersebut menjadi penyedia mesin bagi maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia (Kompas, 2018).

Setelah menganalisis beberapa fenomena yang telah dipaparkan diatas, banyak hal yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan kualitas audit. Para auditor yang melakukan audit laporan keuangan seharusnya dapat menjaga independensi mereka selama memeriksa laporan keuangan untuk menjaga kualitas audit. Lalu siapa yang sebenarnya perlu dilakukan adanya pengawasan yang lebih *detail*, padahal nyatanya sudah ada peraturan yang berlaku untuk diharapkan dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak auditor maupun perusahaan itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya dari beberapa pihak auditor sendiri masih saja tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik sebagai pihak yang diharapkan dapat menemukan kesalahan atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan untuk membantu para pengguna laporan keuangan seperti halnya para investor. Jika pihak auditor nya saja tidak bisa berkomitmen untuk jujur dengan segala temuannya terhadap laporan keuangan yang diauditnya lalu bagaimana dengan pihak perusahaannya yang menyajikan laporan keuangannya tersebut. Mautz dan Sharaf (1961) dan Flint (1988) dalam (Febriyanti & Mertha, 2014) menyatakan bahwa auditor dapat kehilangan independensinya apabila

terjalin hubungan yang nyaman dengan kliennya karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap objektif mereka dalam memberikan opini audit. Maka seharusnya auditor dapat menghasilkan audit yang berkualitas sehingga akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Menjadi suatu hal yang wajar apabila kualitas audit menjadi topik yang selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan, pemerintah, masyarakat serta para investor agar terus menerus untuk selalu melakukan perbaikan atas kualitas audit. Tetapi pada kenyataannya masih banyak auditor yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit variabel pertama yang akan dibahas adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat di tunjukkan dengan melihat total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang besar sering dianggap memiliki manajemen yang berpengalaman dengan system pengendalian intern yang baik pula, nyatanya tidak semua perusahaan besar memiliki manajemen yang berpengalaman hal tersebut menggiring opini bahwa perusahaan besar akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas dibandingkan perusahaan kecil (Fernando *et al.*, 2010 dalam Paramita dan Latrini (2015), dalam (Rizky, 2017). Semakin besar perusahaan maka semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi. Sehingga perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor yang besar pula, tentu saja yang memiliki profesional, independen, dan bereputasi baik agar dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Watts dan Zimmerman, 1986 dalam (Febriyanti & Mertha, 2014). Tetapi perusahaan kecil juga cenderung memiliki informasi dan system yang lemah, itu yang menyebabkan perusahaan kecil tidak begitu diperhatikan oleh para pemegang saham. Sehingga perusahaan-perusahaan kecil dianggap akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas (Rizky, 2017).

Rotasi KAP adalah salah satu peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengharuskan adanya pergantian KAP setelah mengaudit klien yang sama maksimal 6 tahun buku berturut-turut. (Peraturan ini tertuang di PMK No 17/PMK.01/2008). Diberlakukannya peraturan tersebut menjadi salah satu solusi yang muncul untuk dapat mencapai tingkat kualitas audit yang lebih baik. Tujuannya agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu hubungan yang akan terjalin karena faktor kedekatan antara klien dan auditor. Giri (2010) dalam Pamungkas (2014), dalam (Rizky, 2017) menyatakan bahwa terdapat dua argument mendasar yang dapat mendukung rotasi mandatory, yaitu: (1) independensi auditor dapat dirusak oleh hubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan; dan (2) kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu.

Kepemilikan asing adalah jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor baik perorangan maupun badan, investor tersebut berasal dari luar negara atau diluar Indonesia. Begitupun menurut Bokpin & Isshaq (2009) dalam (Saepudin, Puranamasari, & Maemumah, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan asing adalah seberapa besarnya nilai saham yang ditanamkan di perusahaan yang ada di Indonesia oleh individu atau institusi asing. Artinya semakin banyak pihak asing yang menanamkan investasi di perusahaan, akan membawa dampak baik bagi perusahaan yang ditanami saham tersebut salah satunya adalah dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan efek, pemodal asing adalah orang perseorangan warga negara asing atau badan hukum asing. Hal tersebut dapat mendorong para pemodal asing untuk menuntut pelaporan keuangan perusahaan agar memiliki suatu informasi yang berkualitas tinggi. Laporan keuangan yang berkualitas tentu saja dihasilkan dari auditor yang memiliki independensi, integritas, dan objektivitas untuk meningkatkan kualitas audit. Pada umumnya kualitas audit yang tinggi selalu mengharapkan adanya sebuah prinsip dengan pengakuan akrual dalam laporan auditnya, sehingga begitu jelas terlihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Pertemuan Komite Audit adalah salah satu yang mempengaruhi keberhasilan komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Keberadaan komite audit bagi perusahaan telah diatur pada Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dalam Peraturan Bapepam No.Kep-643/BL/2012 yang kemudian disempurnakan lebih jelas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (Saepudin, Puranamasari, & Maemumah, 2018) menyatakan jika semakin sering adanya pertemuan komite audit dilaksanakan maka pengawasan (*monitoring*) pada perusahaan akan lebih efektif dan pada akhirnya kualitas audit diharapkan dapat menjadi lebih baik. Bahwa komite audit akan lebih memiliki informasi tentang masalah audit yang saat itu terjadi di perusahaan karena setiap diadakan pertemuan komite audit selalu membahas masalah yang sedang dihadapi perusahaan dan membuat komite audit lebih aktif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka Wedari (2015) dalam (Saepudin, Puranamasari, & Maemumah, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan (Rizky, 2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian menurut (Darya & Puspitasari, 2017), (Febriyanti & Mertha, 2014) dan (Abdul-Rahman, Benjamin, & Olayinka, 2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan (Nurshanti, Tugiman, & Muslih, 2016), dan (Febriyanti & Mertha, 2014), Rotasi KAP secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut (Rizky, 2017), (Sulthon & Cahyonowati, 2015), dan (Perdana & Juliarto, 2014) menyatakan bahwa rotasi KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasil penelitian Kepemilikan Asing menurut, (Saepudin, Puranamasari, & Maemumah, 2018), dan (Alzeaideen & Al-Rawash, 2018) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut (Sumantaningrum & Kiswara, 2017) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Lalu hasil penelitian Pertemuan Komite Audit menurut (Saepudin, Puranamasari, & Maemumah,

2018) Pertemuan Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Tetapi hasil penelitian menurut (Salawu, Okpanachi , & Yahaya, 2017) Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Adanya inkonsistensi dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan masih relevan untuk dikaji ulang dengan variabel baru dan ruang lingkup yang berbeda. Peneliti termotivasi untuk menganalisa lebih jauh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rotasi KAP, Kepemilikan Asing, dan Pertemuan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Pada Perusahaan Jasa Sektor Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi Tahun 2013-2017)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Kualitas audit menjadi suatu kriteria seorang auditor karena setiap auditor diharapkan dapat memiliki independensi, integritas, dan objektivitas dalam dirinya sendiri. Dengan menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan yang material atau ketidaksesuaian atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, hal tersebut dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Banyak hal yang menjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan kualitas audit, entah itu kesalahan dari pihak auditor nya atau pun dari pihak manajemen perusahaannya sendiri. Yang jelas seharusnya auditor dapat bersikap profesional dan jujur tentang bagaimana kondisi perusahaannya agar pihak auditor pun dapat melaporkan hasil dari laporan keuangan tersebut sesuai dengan temuannya. Jika perusahaan menyajikan laporan keuangan didukung dengan data yang akurat, pihak auditor berhak mengeluarkan laporan hasil audit dengan status WTP.

Auditor yang berkualitas akan mampu untuk mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Adanya kualitas audit yang baik jika auditor menerapkan prinsip sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seorang auditor yang kompeten akan

menghasilkan audit yang berkualitas karena auditor yang kompeten memiliki kemampuan dalam memahami dan melaksanakan prosedur audit secara benar. Lalu hal apa yang menjadi suatu permasalahan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas audit agar para auditor mampu bersikap independen dan objektif. Setiap perusahaan dapat dengan bebas memilih kantor akuntan publik (KAP) mana yang memiliki kualitas audit yang tinggi sesuai dengan batas kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tetapi baik dari pihak perusahaan maupun auditor tetap harus menjaga independensi agar sama-sama dapat lebih mempertanggungjawabkan setiap hal yang akan dilakukan diluar batas pertanggungjawabannya.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Banyak penelitian dan teori yang mengungkapkan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan peneliti adalah:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, rotasi KAP, kepemilikan asing, pertemuan komite audit, dan kualitas audit pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
2. Apakah ukuran perusahaan, rotasi KAP, kepemilikan asing, pertemuan komite audit, berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
4. Apakah rotasi KAP berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
6. Apakah pertemuan komite audit berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, rotasi KAP, pertemuan komite audit, kepemilikan asing, dan kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, rotasi KAP, pertemuan komite audit, kepemilikan asing, berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
3. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
4. Untuk mengetahui apakah Rotasi KAP berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
5. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Asing berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?
6. Untuk mengetahui apakah Pertemuan Komite Audit berpengaruh parsial terhadap kualitas audit pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian pengaruh ukuran perusahaan, rotasi KAP, pertemuan komite audit, kepemilikan asing, terhadap kualitas audit ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang *auditing* mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi auditor dalam melaksanakan tugasnya secara berkualitas.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi para pembaca agar dapat berguna sesuai dengan bidang *auditing* khususnya tentang kualitas audit.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan untuk peneliti selanjutnya dengan penelitian yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, rotasi KAP, pertemuan komite audit, dan kepemilikan asing terhadap kualitas audit pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.

1.6.2 Aspek Praktis

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan investasi dan memberikan pemahaman kepada para investor bahwa laporan keuangan yang di berikan sesuai dengan opini yang dikeluarkan oleh auditor.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan bagi manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar auditor mengeluarkan opini sesuai dengan hasil informasi kondisi keuangan perusahaan.

3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik yang mengaudit suatu perusahaan agar memberikan opini sesuai dengan hasil yang dikeluarkan oleh auditor untuk menjaga kualitas audit.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek dari penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah September 2018- Maret 2019. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima tahun dimulai dari tahun 2013-2017.

1.7.3 Variabel Penelitian

Di dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (dependen) dan tiga variabel bebas (independen). Variabel Independen yaitu ukuran perusahaan, rotasi KAP, pertemuan komite audit, dan kepemilikan asing sedangkan variabel dependen (kualitas audit).

1.8 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab antara lain yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik dan variabel penelitian, penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian dan hipotesis penelitian dijadikan sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, variabel operasional yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, validitas, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan setelah dilakukan penelitian. Hal tersebut merupakan hasil analisis data dan analisis perhitungan. Bab ini juga menjelaskan deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi dan hasil pengolahan data untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (ukuran perusahaan, rotasi KAP, pertemuan komite audit, dan kepemilikan asing) terhadap variabel dependen (kualitas audit).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran maupun rekomendasi penulis secara kongkrit yang diberikan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit dalam aspek praktis untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya serta ditujukan kepada perusahaan dan berbagai pihak yang membutuhkan.